

REKONFIGURASI OLIGARKI DAN KONSOLIDASI DEMOKRASI: ANALISIS RELASI KEKUASAAN PASCA-REFORMASI DI INDONESIA

Fidya Ramadhani Abdullah Dede

Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo

Email: fidyaramadhani35@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the reconfiguration of oligarchy and its implications for the process of democratic consolidation in Indonesia in the post-1998 Reform era. Political reform, marked by the openness of the electoral democratic system, was expected to limit elite domination and strengthen substantive democracy. However, in practice, power relations have demonstrated the continuity and adaptation of oligarchic structures within the new political framework. Therefore, this study seeks to examine how oligarchic power patterns have transformed and how they affect the quality of democratic consolidation in Indonesia. This research employs a qualitative approach using a library research design. The findings indicate that the 1998 Reform did not eliminate oligarchy; instead, it facilitated the reconfiguration of elite power within the mechanisms of electoral democracy. Oligarchic actors have adapted by utilizing political parties, elections, and state institutions as instruments for legitimizing and reproducing their power. As a result, Indonesia's democratic consolidation tends to remain procedural in nature, while substantive democracy continues to face serious challenges, particularly in terms of accountability, political representation, and the equitable distribution of power.

Keywords: Political Oligarchy; Democratic Consolidation; Power Relations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonfigurasi oligarki serta implikasinya terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Reformasi politik yang ditandai dengan keterbukaan sistem demokrasi elektoral diharapkan mampu membatasi dominasi elite dan memperkuat demokrasi substantif. Namun dalam praktiknya, relasi kekuasaan justru menunjukkan keberlanjutan dan adaptasi oligarki dalam struktur politik baru. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pola kekuasaan oligarkis bertransformasi serta dampaknya terhadap kualitas konsolidasi demokrasi di Indonesia. Metode yang digunakan kualitatif dengan desain library research (studi kepustakaan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reformasi 1998 tidak menghilangkan oligarki, melainkan mendorong terjadinya rekonfigurasi kekuasaan elite ke dalam mekanisme demokrasi elektoral. Oligarki beradaptasi dengan memanfaatkan partai politik, pemilu, dan institusi negara sebagai sarana legitimasi dan reproduksi kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan konsolidasi demokrasi Indonesia cenderung bersifat prosedural, sementara demokrasi substantif masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam aspek akuntabilitas, representasi politik, dan keadilan distribusi kekuasaan.

Kata Kunci: Oligarki Politik; Konsolidasi Demokrasi; Relasi Kekuasaan

PENDAHULUAN

Reformasi politik 1998 menandai perubahan mendasar dalam sistem politik Indonesia, ditandai dengan runtuhnya rezim otoritarian dan terbukanya ruang bagi

demokratisasi melalui pemilu yang lebih kompetitif, kebebasan sipil, serta penguatan institusi demokrasi. Perubahan ini menumbuhkan optimisme bahwa Indonesia tengah bergerak menuju konsolidasi demokrasi

yang stabil dan berkelanjutan. Namun demikian, perkembangan demokrasi pasca-Reformasi tidak sepenuhnya berjalan linear dan bebas dari hambatan struktural (Noor, 2020).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa demokratisasi prosedural justru berjalan beriringan dengan menguatnya kembali kekuasaan oligarki dalam konfigurasi baru. Oligarki tidak lagi beroperasi melalui kontrol negara yang terpusat, melainkan beradaptasi dengan mekanisme demokrasi elektoral melalui penguasaan partai politik, pendanaan pemilu, serta kolaborasi antara elite politik dan pemilik modal (Fauzan, 2026; Abdullah, 2025). Kondisi ini menciptakan relasi kekuasaan yang timpang dan membatasi akses masyarakat sipil terhadap ruang deliberasi publik (Sahi et al., 2024).

Penetrasi kekuatan oligarki dalam institusi demokrasi berdampak langsung pada kualitas konsolidasi demokrasi. Berbagai penelitian mencatat bahwa dominasi oligarki berkontribusi terhadap defisit demokrasi, melemahnya akuntabilitas politik, serta munculnya gejala kemunduran demokratis (*democratic backsliding*) dalam praktik ketatanegaraan (Irwin et al., 2025; Rohmah, 2024). Demokrasi tetap berjalan secara formal, namun substansinya kerap tereduksi oleh kepentingan elite yang menguasai sumber daya politik dan ekonomi.

Selain itu, relasi erat antara penguasa dan pengusaha memperkuat pola klientelisme dan patronase politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Fenomena ini terlihat jelas dalam kontestasi elektoral, termasuk pemilu dan pemilihan kepala daerah, yang kerap dijadikan instrumen untuk mempertahankan dan

mereproduksi kekuasaan oligarkis (Heriani, 2023; Firmansyah, 2024; Raintung & Mesra, 2025). Akibatnya, proses demokrasi cenderung menjauh dari prinsip keadilan sosial dan kedaulatan rakyat.

Berbagai kajian telah membahas dinamika demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998, terutama dalam konteks transisi politik dari rezim otoritarian menuju sistem demokrasi elektoral. Penelitian awal menempatkan Indonesia sebagai negara yang berada dalam fase transisi demokrasi, dengan fokus pada perubahan institusional, regulasi politik, dan upaya pembentukan tatanan demokrasi baru (Anugerah & Endiartia, 2018; Martin, 2010). Studi-studi ini memberikan landasan konseptual mengenai arah demokratisasi, namun masih menekankan demokrasi sebagai proses struktural dan prosedural.

Sejumlah penelitian berikutnya memperluas analisis pada aspek teknis demokrasi, seperti sistem kepartaian, sistem pemilu, dan reformasi konstitusi. Kajian mengenai penyederhanaan sistem kepartaian dan penerapan sistem pemilu pasca-Reformasi menunjukkan bahwa perubahan regulatif belum sepenuhnya mampu memperkuat representasi politik dan kedaulatan rakyat secara substantif (Sutisna, 2015; Palenewen & Yanur, 2022; Polamolo, 2013). Fokus utama penelitian-penelitian tersebut masih berkisar pada efektivitas kelembagaan, bukan pada makna demokrasi sebagai identitas politik kolektif.

Di sisi lain, penelitian yang mengkaji relasi sipil–militer dan dinamika masyarakat

dalam praktik demokrasi menyoroti adanya residu kekuasaan lama serta tantangan budaya politik dalam konsolidasi demokrasi. Kajian ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi masih diwarnai oleh ketegangan antara nilai demokratis dan praktik kekuasaan yang belum sepenuhnya sipil dan partisipatif (Djuyandi et al., 2025; Zahratu et al., 2024).

Namun demikian, pembahasan mengenai bagaimana kondisi tersebut memengaruhi pembentukan identitas demokrasi nasional masih relatif terbatas. Lebih lanjut, beberapa penelitian kritis menyoroti aspek konflik sosial, politisasi identitas, dan warisan Orde Baru dalam masa transisi demokrasi. Studi mengenai politisasi SARA dan trauma politik transisional menunjukkan bahwa demokrasi pasca-Reformasi tidak hanya menghadapi persoalan institusional, tetapi juga krisis makna dan orientasi nilai demokrasi itu sendiri (Asgart, 2003; Hermansyah & Faznur, 2025; Akbar et al., 2025). Meski demikian, kajian-kajian tersebut belum secara eksplisit merumuskan reorientasi identitas demokrasi sebagai upaya sadar untuk mewujudkan daulat rakyat.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat konstruksikan bahwa gap penelitian terletak pada belum optimalnya kajian yang memadukan analisis transisi demokrasi dengan upaya konseptualisasi ulang identitas demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Sebagian besar penelitian masih menempatkan demokrasi sebagai sistem dan mekanisme, bukan sebagai identitas politik yang berakar pada kedaulatan rakyat. Oleh karena itu,

penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan mengkaji reorientasi identitas demokrasi Indonesia sebagai ikhtiar normatif dan praksis untuk mewujudkan daulat rakyat dalam konteks pasca-Reformasi.

Oleh karena itu, fokus kajian ini diarahkan pada analisis terhadap proses rekonfigurasi oligarki dalam sistem politik Indonesia pasca-Reformasi 1998 serta implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menelaah bagaimana relasi kekuasaan antara elite politik dan ekonomi dibentuk, dinegosiasikan, dan dipertahankan dalam kerangka demokrasi elektoral, serta sejauh mana pola dominasi tersebut memengaruhi kualitas demokrasi secara substantif, khususnya dalam aspek akuntabilitas, pelebagaan institusi, dan distribusi kekuasaan yang inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain *library research* (studi kepustakaan) untuk menganalisis rekonfigurasi oligarki serta implikasinya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi 1998. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa realitas sosial dan politik bersifat majemuk, dinamis, dan kontekstual, sehingga tidak dapat direduksi ke dalam angka atau pengukuran statistik semata. Dalam kerangka ini, data dipahami sebagai hasil interpretasi terhadap makna, relasi, serta proses sosial-politik yang berlangsung dalam konteks alamiah tertentu (Kusumastuti & Khoiron, 2019; Somantri, 2005; Saleh, 2017).

Desain studi kepustakaan digunakan untuk memahami fenomena yang diteliti secara konseptual dan teoritis melalui penelusuran literatur yang relevan. Studi kepustakaan menekankan pada penafsiran makna, konteks, dan relasi antar konsep yang berkembang dalam berbagai karya ilmiah. Melalui pengumpulan dan analisis literatur, peneliti dapat mengidentifikasi pola pemikiran, perdebatan akademik, serta kecenderungan analitis yang berkaitan dengan relasi kekuasaan, oligarki politik, dan dinamika konsolidasi demokrasi, sehingga memungkinkan penyusunan argumentasi yang sistematis dan berbasis kajian ilmiah (Assyakurrohim et al., 2022; Saefullah, 2024; Poltak & Widjaja, 2024).

Penggunaan pendekatan ini dinilai relevan dengan fokus kajian yang berupaya mendalami relasi kekuasaan, praktik politik, serta transformasi struktur elite dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional, laporan lembaga penelitian, dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran, identifikasi, seleksi, dan klasifikasi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengungkap pola,

kecenderungan, serta konfigurasi relasi kekuasaan yang berkembang dalam sistem politik Indonesia pasca-Reformasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi dan temuan penelitian terdahulu guna memastikan konsistensi, validitas, dan kedalaman analisis. Melalui desain metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemetaan yang komprehensif mengenai perubahan pola dominasi elite serta dampaknya terhadap kualitas konsolidasi demokrasi di Indonesia secara substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonfigurasi Oligarki dalam Sistem Politik Pasca-Reformasi 1998

Reformasi politik 1998 di Indonesia menandai runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru dan membuka jalan bagi demokratisasi melalui pemilu, kebebasan politik, serta restrukturisasi kelembagaan negara. Namun, perubahan tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan struktur kekuasaan lama, melainkan mendorong terjadinya rekonfigurasi oligarki ke dalam sistem politik yang secara formal demokratis tetapi tetap dikendalikan oleh elite terbatas. Oligarki bertransformasi dari pola kekuasaan represif menuju mekanisme dominasi yang lebih adaptif melalui institusi demokrasi dan hukum (Rohmandar, 2025).

Dalam konteks pasca-Reformasi, oligarki tidak lagi mengandalkan kontrol negara yang terpusat, melainkan memanfaatkan demokrasi elektoral sebagai sarana reproduksi

kekuasaan. Penguasaan partai politik, parlemen, dan kebijakan publik menjadi instrumen utama dalam mempertahankan kepentingan kelompok elite. Demokrasi yang seharusnya membuka ruang kompetisi justru dimanfaatkan sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan oligarkis, sehingga terjadi pergeseran paradigma politik dari demokrasi menuju oligarki terselubung (Rohmah, 2024).

Salah satu manifestasi paling menonjol dari rekonfigurasi oligarki tersebut adalah menguatnya praktik politik kartel dalam sistem kepartaian. Partai-partai politik cenderung membentuk koalisi pragmatis yang mengaburkan perbedaan ideologis dan memprioritaskan pembagian kekuasaan serta sumber daya negara. Kartelisasi ini menyebabkan kompetisi politik kehilangan dimensi programatik dan memperlemah fungsi representasi partai sebagai penyalur aspirasi rakyat (Ahmad, 2025).

Kartelisasi partai politik juga berkontribusi terhadap regresi institusional dan menguatnya kembali pola-pola kekuasaan otoritarian dalam praktik demokrasi. Ketika partai politik lebih berfungsi sebagai alat negosiasi elite daripada institusi representatif, ruang kontrol publik terhadap kekuasaan semakin menyempit. Kondisi ini memperlihatkan kerentanan sistem politik pasca-Reformasi terhadap cengkeraman oligarki yang bekerja melalui kesepakatan antar-elite (Gunawan, 2025).

Selain politik kartel, praktik kongkalikong antara elite politik, pemilik modal, dan aparatur negara menjadi ciri penting oligarki politik kontemporer.

Hubungan saling menguntungkan ini terwujud dalam bentuk politik uang, barter kebijakan, serta perlindungan hukum terhadap kepentingan elite tertentu. Kongkalikong tersebut memperlihatkan eratnya relasi antara kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi dalam menentukan arah kebijakan publik (Mugiyanto, 2022).

Politik uang yang semakin masif dalam pemilu pasca-Reformasi tidak dapat dipahami sekadar sebagai pelanggaran etika demokrasi, melainkan sebagai mekanisme oligarkis untuk mengendalikan proses politik dari hulu hingga hilir. Pemilu tetap diselenggarakan secara reguler, namun fungsinya sebagai sarana kedaulatan rakyat mengalami distorsi karena hasil politik lebih ditentukan oleh kekuatan modal dibandingkan kehendak pemilih (Mahroza, 2024).

Dominasi oligarki juga tercermin dalam lemahnya demokrasi internal partai politik. Proses rekrutmen kader dan penentuan kandidat cenderung bersifat tertutup dan dikendalikan oleh elite terbatas, sehingga regenerasi kepemimpinan berjalan tidak demokratis. Partai politik lebih menyerupai organisasi oligarkis daripada institusi pendidikan politik bagi warga negara (Junior, 2021).

Kegagalan partai politik dalam membangun mekanisme internal yang demokratis pada akhirnya memperkuat pelembagaan oligarki dalam sistem politik nasional. Alih-alih menjadi penyeimbang kekuasaan, partai politik justru menjadi bagian integral dari struktur oligarki yang

menghambat terwujudnya demokrasi substantif dan daulat rakyat (Lazarus, 2024).

Secara keseluruhan, rekonfigurasi oligarki pasca-Reformasi menunjukkan adanya paradoks demokrasi, di mana prosedur demokratis berjalan relatif stabil, tetapi substansinya mengalami kemunduran. Penetrasi oligarki dalam sistem hukum, pemilu, dan kepartaian menyebabkan demokrasi kehilangan orientasi pada keadilan politik dan kedaulatan rakyat, serta membuka ruang bagi kemunduran demokrasi secara bertahap (Irwin et al., 2025).

Dengan demikian, oligarki politik kontemporer di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai anomali, melainkan sebagai hasil dari interaksi antara warisan kekuasaan lama dan desain institusional demokrasi pasca-Reformasi. Rekonfigurasi oligarki ini menegaskan bahwa tantangan utama demokrasi Indonesia bukan hanya menjaga prosedur demokratis, tetapi juga membongkar struktur kekuasaan yang menghambat terwujudnya demokrasi substantif (Rohmandar, 2025).

Perkembangan sistem politik pasca-Reformasi 1998 di Indonesia memperlihatkan bahwa demokratisasi prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan pelembagaan sistem politik yang demokratis. Penelitian Budiatri menunjukkan bahwa sejak 1998 hingga saat ini, sistem kepartaian Indonesia berkembang dalam pola oligarkis yang sultanistik, di mana kepemimpinan partai terkonsentrasi pada figur elite dengan kendali sumber daya ekonomi dan politik, sehingga partai cenderung menjadi

kendaraan kekuasaan personal dibandingkan institusi representatif publik (Budiatri, 2015).

Kondisi tersebut berdampak langsung pada rendahnya institusionalisasi partai politik. Meskipun kompetisi elektoral berlangsung secara reguler, partai politik belum mampu menjalankan fungsi kaderisasi, agregasi kepentingan, dan pendidikan politik secara optimal karena dominasi elite internal yang bersifat oligarkis dan tertutup terhadap partisipasi kader serta masyarakat luas (Arrusadi, 2020).

Dominasi oligarki juga menguat dalam ranah hukum dan konstitusi pasca-Reformasi. Abdullah menegaskan bahwa reformasi hukum yang digulirkan sejak 1998 kerap terjebak dalam kesenjangan antara wacana demokratisasi dan praktik politik elite, di mana hukum justru dijadikan instrumen untuk melanggengkan kepentingan kelompok dominan melalui regulasi yang kompromistis dan minim akuntabilitas publik (Abdullah, 2025).

Situasi ini tidak terlepas dari karakter transisi politik pasca-Orde Baru yang bersifat elitis dan negosiatif. Dewi mencatat bahwa keberlanjutan elite lama dan jaringan kekuasaan Orde Baru dalam sistem politik baru telah melahirkan oligarki pasca-Reformasi yang relatif tertutup, sehingga akses masyarakat sipil terhadap kekuasaan politik tetap terbatas meskipun institusi demokrasi telah dibentuk (Dewi, 2024).

Dalam perspektif ekonomi politik, reformasi pasca-1998 memang menghasilkan stabilisasi makroekonomi, namun gagal mengoreksi struktur ketimpangan dan

dominasi oligarki ekonomi. Transformasi ekonomi yang terjadi justru menunjukkan kesinambungan relasi antara negara dan pemodal besar, sehingga demokrasi politik tidak diikuti oleh demokratisasi ekonomi yang substantif (Anselmo et al., 2025).

Pengaruh oligarki juga merembes ke ranah ideologi dan identitas politik. Studi tentang transformasi Islam politik pasca-Reformasi menunjukkan bahwa meskipun ruang demokrasi terbuka lebih luas, ekspresi politik berbasis aspirasi akar rumput tetap dibatasi oleh struktur kekuasaan oligarkis yang mengontrol akses ke partai politik dan arena kekuasaan formal (Islam, 2019).

Dampak lebih jauh dari dominasi oligarki terlihat pada kualitas demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Ismayani dan kolega menemukan bahwa praktik oligarki pasca-Reformasi berkontribusi pada pelemahan demokrasi substantif melalui kebijakan represif, pembatasan kebebasan sipil, serta kriminalisasi kritik terhadap kekuasaan, sehingga demokrasi lebih bersifat prosedural daripada berorientasi pada keadilan dan kedaulatan rakyat (Ismayani et al., 2022).

Dalam konteks politik kontemporer, oligarki juga beradaptasi melalui penggunaan populisme dan politik identitas sebagai strategi legitimasi. Atikah dan kolega menunjukkan bahwa populisme pasca-Reformasi sering kali dikendalikan oleh elite ekonomi-politik untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan struktural, sekaligus memperkuat dominasi oligarki dalam kontestasi elektoral (Atikah et al., 2025).

Praktik oligarki pasca-Reformasi juga mengalami transformasi dalam bentuk yang disebut sebagai “neo-KKN”, yakni pola kolusi, korupsi, dan nepotisme yang beroperasi dalam kerangka demokrasi elektoral. Fenomena ini menunjukkan bahwa reformasi institusional belum mampu memutus relasi patronase antara elite politik dan ekonomi, melainkan justru menyediakan ruang adaptasi baru bagi oligarki (Prasetyo, 2023).

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi masih menghadapi persoalan struktural yang serius. Oligarki tidak hanya bertahan, tetapi semakin terlembaga dalam sistem kepartaian, hukum, ekonomi, dan ideologi politik, sehingga demokrasi yang berkembang cenderung elitis dan menjauh dari prinsip daulat rakyat (Fauzan, 2026).

Implikasi Relasi Kekuasaan terhadap Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Relasi kekuasaan yang terbentuk pasca-Reformasi 1998 membawa implikasi yang kompleks terhadap proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Perubahan dari rezim otoriter menuju sistem politik yang lebih terbuka memang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, namun pada saat yang sama melahirkan konfigurasi kekuasaan baru yang sarat dengan kompetisi elite, fragmentasi politik, serta pelembagaan praktik-praktik kekuasaan informal. Konsolidasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh kemampuan negara dan masyarakat sipil dalam membangun tata kelola kekuasaan yang akuntabel dan inklusif (Dewi, 2024).

Salah satu implikasi utama relasi kekuasaan pasca-reformasi adalah menguatnya politik identitas dalam kontestasi demokrasi. Politik identitas kerap digunakan oleh elite politik sebagai instrumen mobilisasi dukungan elektoral, terutama dalam konteks pemilu langsung. Praktik ini sering kali memanfaatkan sentimen etnis, agama, dan kultural yang justru berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi substantif. Alih-alih memperkuat rasionalitas politik warga, politik identitas cenderung memperdalam polarisasi sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi (Erinaldi, 2024).

Di tingkat lokal, desentralisasi kekuasaan yang lahir dari Reformasi 1998 juga membawa dinamika relasi kekuasaan yang ambivalen terhadap konsolidasi demokrasi. Di satu sisi, otonomi daerah memberikan ruang bagi partisipasi politik yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun di sisi lain, desentralisasi membuka peluang bagi munculnya elite lokal yang membangun basis kekuasaan eksklusif melalui patronase politik dan penguasaan sumber daya lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokratisasi prosedural tidak selalu berbanding lurus dengan demokratisasi substantif di tingkat lokal (Hidayat, 2011).

Fragmentasi sistem kepartaian turut memperumit relasi kekuasaan dalam proses konsolidasi demokrasi. Banyaknya partai politik pasca-reformasi mencerminkan kebebasan politik, tetapi juga memunculkan relasi elite-partai yang pragmatis dan transaksional. Partai politik kerap lebih berfungsi sebagai kendaraan kekuasaan elite dibandingkan sebagai sarana artikulasi

kepentingan publik. Fragmentasi ini berdampak pada lemahnya institusionalisasi partai dan menurunnya kualitas representasi politik (Ahmad, 2025).

Selain itu, konsolidasi demokrasi Indonesia juga dihadapkan pada persoalan regresi institusional, di mana praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kartelisasi politik tetap bertahan dalam sistem demokrasi formal. Relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara elite politik dan institusi pengawasan memperlihatkan bahwa demokrasi pasca-reformasi masih rentan terhadap kemunduran substantif. Kondisi ini menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya membutuhkan stabilitas politik, tetapi juga reformasi institusional yang berkelanjutan (Gunawan, 2025).

Dalam konteks hubungan negara dan kelompok sosial-keagamaan, relasi kekuasaan pasca-reformasi turut memengaruhi arah konsolidasi demokrasi. Meningkatnya peran kelompok keagamaan dalam ruang publik membawa implikasi ganda: di satu sisi memperkaya demokrasi partisipatoris, namun di sisi lain berpotensi menggeser demokrasi ke arah eksklusivisme simbolik. Ketegangan antara kebebasan berekspresi dan komitmen terhadap pluralisme menjadi tantangan serius bagi konsolidasi demokrasi Indonesia (Widodo, 2007; Angretnowati & Karolus, 2022).

Secara keseluruhan, implikasi relasi kekuasaan terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa transisi demokrasi belum sepenuhnya menghasilkan tatanan politik yang stabil dan inklusif. Konsolidasi demokrasi masih menghadapi

tantangan struktural berupa dominasi elite, politik identitas, fragmentasi kepartaian, serta lemahnya institusi demokrasi. Oleh karena itu, penguatan demokrasi Indonesia ke depan menuntut pembenahan relasi kekuasaan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik (Wasi, 2024; Budiatri, 2015).

Berdasarkan pola empiris umum (general empirical pattern) dari berbagai kajian pasca Reformasi 1998, sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung membawa implikasi yang bersifat ambivalen terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, mekanisme pemilihan langsung memperkuat legitimasi politik Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang mandat rakyat secara langsung. Hal ini berkontribusi pada stabilitas pemerintahan dan memperjelas hubungan pertanggungjawaban politik antara pemimpin eksekutif dan pemilih (Dini, 2019).

Namun demikian, penguatan legitimasi elektoral tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan penguatan mekanisme akuntabilitas substantif. Dalam praktiknya, sistem presidensial pasca reformasi justru mendorong terbentuknya koalisi politik yang bersifat pragmatis dan transaksional. Konfigurasi ini berimplikasi pada melemahnya fungsi pengawasan parlemen terhadap Presiden dan Wakil Presiden, termasuk dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan politik (Nainggolan, 2018; Irwin et al., 2025).

Lebih lanjut, konsolidasi demokrasi juga dipengaruhi oleh performa institusi penegak hukum dan lembaga independen. Studi Hanifuddin menunjukkan bahwa peran Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong etika pemerintahan dan komunikasi publik yang transparan menjadi elemen penting dalam menopang konsolidasi demokrasi. Akan tetapi, resistensi elite politik terhadap penguatan lembaga pengawas justru menandakan adanya ketegangan struktural antara kepentingan kekuasaan dan prinsip akuntabilitas demokratis (Hanifuddin, 2021).

Dari perspektif sosial-politik, dinamika media massa dan politik identitas pasca reformasi turut memengaruhi kualitas demokrasi. Media tidak hanya berfungsi sebagai arena kontrol publik, tetapi juga kerap menjadi instrumen mobilisasi kepentingan politik tertentu, termasuk dalam politik Islam dan wacana identitas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konsolidasi demokrasi tidak hanya bergantung pada desain institusional, tetapi juga pada relasi kuasa dalam ruang publik (Putra, 2019; Jati, 2017).

Selain itu, pelemahan masyarakat sipil dan meningkatnya dominasi oligarki politik menjadi implikasi serius dari desain kelembagaan demokrasi pasca reformasi. Ketergantungan Presiden pada dukungan koalisi besar di parlemen berdampak pada berkurangnya ruang kritik dan kontrol masyarakat sipil terhadap kekuasaan eksekutif. Akibatnya, konsolidasi demokrasi cenderung bersifat prosedural, tanpa diiringi pendalaman demokrasi substantif (Djo & Jenila, 2022; Budiatri et al., 2019).

Faktor eksternal seperti pandemi Covid-19 juga memperlihatkan kerentanan demokrasi Indonesia. Kebijakan darurat yang memperkuat peran eksekutif dalam situasi

krisis, meskipun diperlukan, berpotensi mempersempit mekanisme checks and balances jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang efektif (Kusmanto et al., 2022).

Secara empiris dapat dimaknai bahwa sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pasca reformasi telah memperkuat legitimasi demokratis secara elektoral, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin konsolidasi demokrasi yang substantif. Tantangan utama terletak pada relasi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan aktor non-negara, yang masih didominasi oleh kepentingan elite politik dan logika oligarkis.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Reformasi 1998 tidak serta-merta mengakhiri dominasi oligarki dalam sistem politik Indonesia, melainkan mendorong terjadinya rekonfigurasi pola kekuasaan oligarkis ke dalam kerangka demokrasi elektoral. Oligarki beradaptasi dengan memanfaatkan institusi demokrasi, terutama partai politik dan mekanisme pemilu, sebagai sarana legitimasi dan reproduksi kekuasaan. Demokratisasi pasca-Reformasi dengan demikian lebih menonjolkan aspek prosedural, sementara struktur kekuasaan yang timpang relatif bertahan dan terlembaga.

Rekonfigurasi oligarki tercermin dalam praktik politik kartel, lemahnya demokrasi internal partai, serta menguatnya relasi transaksional antara elite politik dan pemilik modal. Partai politik cenderung berfungsi sebagai kendaraan elite dibandingkan sebagai

sarana representasi kepentingan publik. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas kompetisi politik yang berbasis ide dan program, sekaligus membatasi ruang partisipasi politik yang bermakna bagi warga negara.

Implikasi dari konfigurasi relasi kekuasaan tersebut terhadap konsolidasi demokrasi Indonesia bersifat paradoksal. Di satu sisi, demokrasi elektoral berjalan relatif stabil dengan penyelenggaraan pemilu yang reguler dan legitimasi pemerintahan yang kuat. Namun di sisi lain, demokrasi substantif menghadapi hambatan serius akibat melemahnya mekanisme akuntabilitas, checks and balances, serta independensi institusi hukum. Konsolidasi demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan institusi demokratis, tetapi juga oleh distribusi kekuasaan yang adil dan terbebas dari dominasi oligarkis.

Dengan demikian, penguatan demokrasi Indonesia ke depan menuntut pembenahan relasi kekuasaan melalui penguatan demokrasi internal partai, pembatasan pengaruh modal dalam politik, serta revitalisasi peran masyarakat sipil sebagai pengontrol kekuasaan. Tanpa upaya tersebut, demokrasi Indonesia berpotensi terus stabil secara prosedural, namun rapuh secara substantif.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, A. (2025). Reformasi hukum dalam cengkeraman oligarki: Menelusuri kesenjangan legitimasi konstitusional dan kepentingan elite. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 19(1), 45–62.

- Ahmad, Z. (2025). Fragmentasi politik reposisi partai dalam pencarian format ideal pasca reformasi. *Jurnal Supremasi*, 15(1), 23–40.
- Akbar, B. W., Iskandar, W. N. R., & Tazid, A. (2025). Transisi demokrasi Indonesia pasca Orde Baru perspektif Giorgio Agamben. *Journal of Public Power*, 4(1), 1–15.
- Angretnowati, Y., & Karolus, M. L. (2022). Negara, gerakan Islam pasca-fundamentalis dan masa depan demokrasi di Indonesia: Kekuasaan simbolik dan upaya konsolidasi. *Politika*, 13(2), 201–218.
- Anselmo, D., Estuti, E. P., & Fadhlih, S. (2025). Transformasi makroekonomi Indonesia: Dari Orde Baru menuju stabilisasi reformasi (1998–2004). *Jurnal STIE Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 101–120.
- Anugerah, B., & Endiartia, J. J. (2018). Reorientasi identitas demokrasi Indonesia di era pasca reformasi: Sebuah ikhtiar mewujudkan daulat rakyat. *Jurnal Lemhannas RI*, 6(2), 45–60.
- Arrusadi, F. (2020). Menakar arah demokrasi: Konstelasi partai politik dalam proses pemilihan umum pasca reformasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 6(1), 23–40.
- Asgart, S. M. (2003). *Politisasi SARA: Dari masa Orde Baru ke masa transisi demokrasi*. ISAI.
- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., et al. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Penelitian*, 6(1), 1–12.
- Atikah, P., Muary, R., & Pohan, R. (2025). Dinamika populisme Islam pasca reformasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 29(1), 67–85.
- Budiatri, A. P. (2015). Pelembagaan sistem kepartaian di bawah sistem demokrasi Indonesia (1998–sekarang). *Jurnal Penelitian Politik*, 12(2), 179–198.
- Budiatri, A. P., Mengko, D. M., Noor, F., & Gayatri, I. H. (2019). *Menimbang demokrasi dua dekade reformasi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dewi, N. K. (2024). Reformasi 1998: Transisi dari Orde Baru ke era demokrasi di Indonesia. *Historia Vitae*, 8(1), 1–18.
- Dini, M. F. (2019). *Sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia terhadap pertanggungjawaban dan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden pasca reformasi* [Skripsi/Tesis, Universitas Islam Indonesia].
- Djo, D. B. G. D., & Jenila, P. E. K. (2022). Pelemahan masyarakat sipil dan gagalnya desain kelembagaan demokrasi pasca reformasi 1998. *Journal of Politics and Policy*, 6(1), 33–49.
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis hubungan sipil-militer di Indonesia pasca reformasi 1998.

- Journal of Political Issues*, 3(1), 22–38.
- Erinaldi, E. (2024). Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 89–104.
- Fauzan, I. (2026). *Indonesia mencari demokrasi: Dari hegemoni ke oligarki*. Penerbit Buku Kompas.
- Firmansyah, Y. (2024). Analisis konfigurasi politik pasca penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum: Tinjauan terhadap dinamika kekuatan partai politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 12(2), 101–118.
- Gunawan, A. (2025). An institutional regression analysis and the resurgence of authoritarian patterns: Senjakala demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Journal of State Democracy*, 4(2), 66–84.
- Hanifuddin, M. (2021). *Konsolidasi demokrasi dan performa komunikatif: Studi atas peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam konsolidasi demokrasi Indonesia pasca reformasi*. FISIP UIN Syarif Hidayatullah.
- Heriani, I. (2023). Analisis pemilu kepala daerah dalam konsolidasi sistem demokrasi Indonesia. Dalam *Korupsi, Pemilu, dan Demokrasi Lokal* (hlm. 33–50).
- Hermansyah, U., & Faznur, R. S. (2025). Akhir era Orde Baru dan awal reformasi di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 10–25.
- Hidayat, R. A. (2011). Pengembangan konstruksi contentious politic theory dalam kontestasi demokrasi politik lokal pasca reformasi politik 1998. *Forum Ilmiah*, 6(2), 77–95.
- Irwin, D., Erwiansyah, M. D., & Khairullah, D. (2025). Dinamika hukum konstitusi dan tantangan praktik demokrasi di Indonesia: Studi kritis terhadap oligarki politik dan reformasi sistem pemilu. *Judge: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 77–95.
- Islam, G. M. S. (2019). *Transformasi Islam politik era reformasi*. Penerbit UIN Sunan Kalijaga.
- Ismayani, I., Yusri, Y., & Sianturi, P. (2022). Analisis pengaruh oligarki terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. *All Fields of Science Journal*, 2(3), 211–225.
- Jati, W. R. (2017). Radikalisme politik kelas menengah Muslim Indonesia pasca reformasi. *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 41(2), 385–404.
- Juniar, A. (2021). Redesain demokrasi internal partai politik: Upaya mencegah oligarki dan korupsi partai politik. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(1), 1–18.
- Kusmanto, H., Ekayanta, F. B., & Bahri, S. (2022). Dampak pandemi Covid-19 terhadap demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 6(2), 141–

- 158.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Lazarus, L. (2024). Peran partai politik dalam mencegah praktik oligarki di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 6(2), 101–118.
- Mahroza, D. (2024). Penyebab terjadinya politik uang. *Ilmu dan Budaya*, 46(3), 321–336.
- Martin, A. (2010). Quo vadis transisi demokrasi: Arah demokratisasi Indonesia di tengah demokrasi pasar. *Spektrum*, 8(2), 55–70.
- Mugiyanto, M. (2022). Hubungan oligarki kekuasaan dengan politik hukum penguasa. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 3(2), 89–104.
- Nainggolan, P. P. (2018). Peran kapital dan gagalnya konsolidasi demokratisasi Indonesia: Pendekatan ekonomi politik. *Jurnal Politica*, 9(1), 1–18.
- Noor, F. (2020). *Demokrasi dan oligarki*. Kompas Media Nusantara.
- Palenewen, J. D. O., & Yanur, M. (2022). Penerapan sistem pemilu di Indonesia pasca reformasi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(1), 66–82.
- Polamolo, S. (2013). Reformasi konstitusi Indonesia: Fenomena transisi kekuasaan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1), 1–17.
- Poltak, H., & Widjaja, R. R. (2024). Pendekatan metode studi kasus dalam riset kualitatif. *Local Engineering Journal*, 5(2), 45–56.
- Prasetyo, S. (2023). “Neo-KKN” dan tantangan demokratisasi Indonesia dalam pendekatan oligarki. *Global Insight Journal*, 5(2), 89–105.
- Putra, N. (2019). Media massa dan politik Islam pasca reformasi 1998. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 101–118.
- Raintung, A., & Mesra, R. (2025). Hubungan penguasa dan pengusaha: Kajian sosiologi politik dan demokrasi. *ETIC (Education and Social Sciences Journal)*, 6(1), 14–29.
- Rohmandar, A. (2025). Identifikasi praktik politik kartel dan kongkalikong di Indonesia: Analisis komprehensif terhadap fenomena oligarki politik kontemporer. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 4(1), 11–29.
- Rohmah, E. (2024). Perubahan paradigma politik di Indonesia dari demokrasi ke oligarki. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 16(2), 89–105.
- Sahi, Y., Mahmud, R., & Hamim, U. (2024). Political Preferences of Voters with Disabilities in the 2024 Elections: Values, Perceptions, Trends and Satisfaction Vs Ideological Values and Group Strength. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(1), 632–646.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam penelitian kualitatif berbasis kepustakaan pada

-
- studi agama dan keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 9(1), 23–38.
- Saleh, S. (2017). *Analisis data kualitatif*. Universitas Negeri Makassar.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57–65.
- Sutisna, A. (2015). Politik penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pasca reformasi 1998. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 120–134.
- Wasi, I. (2024). *Konsolidasi demokrasi: Sebuah telaah politik pasca-reformasi dari politik lokal hingga nasional*. Penerbit Buku Ilmiah.
- Widodo, S. A. (2007). Islam dan demokrasi pasca Orde Baru. *Unisia*, 30(65), 287–300.
- Zahratu, N. S., Chatrine, C., & Fiandie, U. J. (2024). Analisis dinamika masyarakat dalam berdemokrasi di era pra-reformasi dan pasca-reformasi dalam pemilihan umum. *Media Hukum Indonesia*, 6(1), 40–58.